

Determinan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah = The determinants of Indonesian audit board's opinion Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)'s opinion on local government financial statements / Wildan Massani

Wildan Massani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20445724&lokasi=lokal>

---

Abstrak

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap opini Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD. Faktor-faktor tersebut terdiri dari keterlambatan belanja barang/jasa, keterlambatan belanja modal, persentase tindak lanjut rekomendasi BPK, kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem e-procurement. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan sampel pemerintah daerah di Indonesia tahun 2011-2013 yang terdiri dari 399 kabupaten dan 92 kota. Metode penelitian yang dipakai adalah ordered logit. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterlambatan belanja barang/jasa dan keterlambatan belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan tingginya tingkat opini BPK atas LKPD. Sementara persentase tindak lanjut rekomendasi BPK, kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem e-procurement mempunyai pengaruh positif terhadap kemungkinan tingginya tingkat opini BPK atas LKPD.

---

**ABSTRACT**

This study analyses the determinants of BPK's opinion to local government financial statements LKPD. These determinants consist of delays in goods and services spending, delays in capital spending, the percentage of follow up on BPK's recommendations, the quality of human resources and the implementation of e-procurement system. Data used is secondary from 491 Indonesian local governments consists of 399 districts and 92 cities for the period of 2011-2013. The research method used is ordered logit models. The results revealed that delays in goods and services spending also delays in capital spending had a negative effect on the possibility of high level of BPK's opinion to LKPD. In addition the percentage of follow up on BPK's recommendation, the quality of human resources and the implementation of e-procurement system positively influence the possibility of high level of BPK's opinion to LKPD.